

## Peranan Radio Republik Indonesia Pekanbaru pada Peristiwa Pemberontakan Pemerintahan Republik Revolusioner Indonesia di Riau (1957-1958)

Nirnalolita<sup>1</sup> Isjoni<sup>2</sup> Asyrul Fikri<sup>3</sup>

Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [nirnalolita3201@student.unri.ac.id](mailto:nirnalolita3201@student.unri.ac.id)<sup>1</sup> [isjoni@lecturer.unri.ac.id](mailto:isjoni@lecturer.unri.ac.id)<sup>2</sup>  
[asyrul.fikri@lecturer.unri.ac.id](mailto:asyrul.fikri@lecturer.unri.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Artikel ini mengkaji peranan radio republik indonesia pekanbaru pada peristiwa pemberontakan pemerintahan republik revolusioner indonesia di riau pada tahun 1957 hingga 1958. Permasalahan yang diteliti dalam artikel ini mengenai bagaimana proses terjadinya PRRI di riau dan bagaimana peranan radio republik indonesia pekanbaru turut andil ikut serta dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat riau melalui siaran radio, serta apa saja dampak setelah terjadinya peristiwa PRRI. Penulis mengkajinya dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode penelitian sejarah Louis Gottschalk yang meliputi heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Radio republik indonesia pekanbaru turut andil dalam hal menyampaikan informasi mengenai peristiwa PRRI yang pada waktu itu sedang berlangsung, dan semenjak ikut andil pada peristiwa PRRI, radio republik indonesia pekanbaru mulai dikenal oleh masyarakat riau dan memulai eksistensinya di dunia penyiaran di riau.

**Kata Kunci:** Peranan, Radio Republik Indonesia, PRRI

### Abstract

*This article examines the role of Indonesian Republic Radio Pekanbaru in the rebellion of the Indonesian Revolutionary Republic government in Riau in 1957 to 1958. The problems examined in this article are about the process of PRRI in Riau and how the role of Indonesian Republic Radio Pekanbaru played a role in taking part in it. convey information to the people of Riau through radio broadcasts, as well as what the impacts were after the PRRI incident occurred. The author studies it with a qualitative approach and uses Louis Gottschalk's historical research methods which include heuristics, verification, interpretation and historiography. Radio Republik Indonesia Pekanbaru took part in conveying information about the PRRI events which were taking place at that time, and since taking part in the PRRI events, Radio Republik Indonesia Pekanbaru began to be known by the people of Riau and began its existence in the world of broadcasting in Riau.*

**Keywords:** Role, Radio Republik Indonesia, PRRI



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia secara resmi telah memperoleh kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Keberhasilan rakyat Indonesia ini ditandai dengan pengorbanan harta, benda bahkan nyawa manusia. Namun, setelah kemerdekaan tercapai bangsa Indonesia tidak berarti atau telah lepas dari perjuangan, sebagai nasional state yang baru saja lepas dari situasi perang terhadap kolonialisme. Bangsa Indonesia berada dalam keadaan tidak menentu, baik secara fisik maupun psikis untuk mencari atau menempatkan diri pada situasi negara yang mandiri lepas dari tangan negara asing (Leirissa, 1991). Pasca kemerdekaan para pemimpin yang kurang berpengalaman hanya mementingkan kepentingan pribadinya, sehingga banyak terjadi penyelewengan dalam birokrasi pemerintahan yang semua itu menambah jumlah persoalan-persoalan yang ada (Audrey,2005). Periodisasi sejarah tahun

1949-1959 ditandai dengan banyaknya kemelut yang terjadi di dalam negeri. Adanya berbagai percobaan perlawanan terhadap pemerintahan pusat selalu dapat diatasi dengan kekuatan militer secara koersif. Salah satunya periode tahun 1958 sampai 1961 terjadi pembangkangan daerah terhadap pusat yang digerakan oleh dewan-dewan daerah di Sumatera (Idris, 2008).

Setelah menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 agustus 1945, pemerintah pusat telah membuat rancangan untuk membentuk suatu pemerintahan yang menggunakan sistem desentralisasi. Artinya, kekuatan dan kedaulatan politik dibagi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga daerah diberi kebebasan untuk melaksanakan keputusan yang dibuat oleh oleh pemerintah pusat, sesuai dengan cara dan situasi di daerah mereka (Audrey, 2005). Penerapan sistem desentralisasi ini pada masa Orde Lama juga menjadi tuntutan masyarakat di daerah. Soekarno yang menjanjikan penerapan sistem desentralisasi di daerah luar Pulau Jawa ternyata tidak kunjung menepati janjinya. Hal ini memicu munculnya aksi protes oleh masyarakat yang berada di luar Pulau Jawa, seperti munculnya gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera, dan PERMESTA di Sulawesi. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada mulanya bukan suatu gerakan pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Gerakan ini mengambil wilayah Riau sebagai basis kekuatannya (Gusti,2003). Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian mendalam mengenai peranan Radio Republik Indonesia pada peristiwa PRRI pasca kemerdekaan Negara Republik Indonesia khususnya di Riau. Adapun judul dalam penelitian ini yaitu "Peranan Radio Republik Indonesia Pekanbaru Pada Peristiwa Pemberontakan Pemerintahan Republik Revolusioner Indonesia Di Riau (1957-1958)".

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini merupakan hasil penelitian sejarah. Metode sejarah merupakan suatu usaha untuk memberikan interpretasi dari bagian trend yang naik turun dari suatu keadaan dimana yang lampau untuk memperoleh suatu generalisasi yang berguna untuk memahami sejarah, membandingkan dengan keadaan sekarang dapat meramal keadaan yang akan datang (Nazir,1998). Dilain sisi Louis Gottschalk menjelaskan metode sejarah sebagai proses menguji dan menganalisis kesaksian sejarah guna menemukan data yang autentik dan dapat dipercaya, serta usaha sintesis atas data semacam itu menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya (Dudung, 2007). Proses ini membutuhkan empat tahap yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Pertama heuristik adalah suatu teknik, suatu seni, dan bukan suatu ilmu. Heuristik tidak mempunyai peraturan-peraturan umum, melainkan heuristik ialah suatu keterampilan dalam menemukan, menangani, dan memerinci bibliografi, atau mengklasifikasi dan merawat catatan-catatan masa lalu. Jadi, heuristik dapat dikatakan sebagai proses menemukan atau mengumpulkan sumber-sumber sejarah.

Kemudian yang kedua adalah verifikasi ,Verifikasi atau kritik sumber ialah proses mencari kebenaran dari sumber sejarah yang telah ada. Dengan adanya kritik sumber ini diharapkan tidak ada sumber sejarah yang berasal dari suatu fantasi, manipulasi, dan fabrikasi sejarawan. Sehingga tulisan ilmiah tersebut dapat di pertanggung jawabkan. Kemudian setelah verifikasi ada tahap interpretasi yaitu kegiatan menafsirkan fakta maupun data juga menentukan makna dan hubungan fakta maupun data yang telah diperoleh. Pada tahap interpretasi penulis atau sejarawan dituntut untuk berimajinasi bagaimana masa lalu yang akan dibahas pada penelitian. Tahapan interpretasi menjadi salah satu cara menafsir segala kenyataan dan merupakan tahapan paling krusial ataupun paling rawan, serta tahapan inilah kedudukan dan objektifitas penulis diuji, hal ini dikarenakan penggunaan sudut

pandangan yang digunakan penulis akan menentukan ke arah mana penelitian ini akan dibawa. Dan yang terakhir adalah tahap historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Pada tahap inilah penulis menuangkan penafsiran terhadap fakta maupun data yang telah penulis dapatkan secara kronologis dalam bentuk tulisan. Maka dari itu peneliti dituntut untuk memiliki kemampuan berfikir yang baik serta mampu menungkan hasil penelitiannya dengan bahasa yang baik dan secara kronologis dan mampu menyajikan tulisan secara sistematis dan jelas.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah PRRI di Riau**

Pada tahun 1948-1965 bangsa Indonesia menghadapi berbagai ancaman disintegrasikan. Berbagai pergolakan terjadi pada masa itu salah satunya adalah pemberontakan PRRI. Penyebab terjadinya PRRI bukanlah peristiwa tunggal tetapi berbagai aspek pemerintahan yang diabaikan presiden Soekarno. Gerakan PRRI ini dimotori oleh kalangan militer, tetapi diikuti oleh semua kalangan sipil, politikus, tentara, polisi, guru, petani, dan orang-orang dari berbagai kalangan lainnya. Munculnya gerakan ini berawal dari adanya reuni oleh perwira ex-divisi Banteng yang dicitkan oleh pemerintah ke dalam Resimen IV Sumatra Utara. Pertemuan ini lebih bersifat silaturahmi membuat sebuah rencana untuk mengadakan sebuah reuni ex-Divisi Banteng, mengingat bahwa sudah terlalu lama mereka yang merupakan teman seperjuangan pada masa revolusi itu terpisah satu dan yang lainnya, disebabkan karena tempat tugas mereka sejak terjadi penciptaan Divisi Banteng menjadi tersebar dimana-mana.

Kelanjutan dari pertemuan ini adalah dibentuknya panitia reuni yang diketahui oleh Mayor Sofyan, dan akan dilaksanakan di Padang pada tanggal 20-24 November 1956. Acara reuni tersebut dihadiri oleh 612 orang ex-Divisi Banteng. Dalam reuni terakhir tanggal 24 November 1956, semua yang hadir membuat dan menandatangani kesepakatan yang mereka beri nama Piagam Banteng yang nantinya akan mereka suarakan pada pemerintah pusat. Beberapa hari kemudian sebuah tim delegasi berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan tuntutan tersebut yaitu diantaranya, Ali Luis, Sitan Soeis, Hasan Basri, Sidi Bakaruddin, Dahlan Djambek, Dahlan Ibrahim, dan Amdul Halim. Tujuan mereka semula adalah bermaksud untuk menemui Presiden, Wakil Presiden, anggota Kabinet, dan pimpinan lainnya akan tetapi mereka hanya mampu bertemu Kepala Sekretariat Presiden, Mr. A. G. Pringgodigdo. Pada tanggal 15 Februari 1958 malam, Dewan Banteng memproklamkan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) melalui RRI Bukittinggi. Hal ini berarti pemberontakan terhadap NKRI telah dimulai. Tindakan Dewan Banteng yang memproklamkan berdirinya PRRI, membuat pemerintahan pusat di Jakarta segera mengambil langkah untuk menghentikan pemberontakan daerah tersebut dan memutuskan untuk segera merealisasikan UU Darurat No. 19 Tahun 1957, dengan tujuan memecah kekuatan PRRI.

### **Peran RRI Pekanbaru pada peristiwa PRRI di Riau**

Pada tahun 1957 dan akhir tahun 1958 pemerintah Republik Indonesia terlibat dalam kekacauan peristiwa pemberontakan yang disebut Pemerintahan Republik Revolusioner Indonesia (PRRI). Suasana pemberontakan PRRI ini mengguncangkan kehidupan Bangsa Indonesia. Di beberapa wilayah Indonesia terjadi pemberontakan PRRI. Untuk menanggulangi keresahan Rakyat Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, mengambil langkah-langkah untuk menghindarkan pertumpahan darah lebih banyak mengadakan pengamanan terhadap daerah-daerah yang dikuasai pemerintah Republik Revolusioner (PRRI). Pada tanggal 1 Maret 1957 Pemerintah Pusat mengirimkan beberapa pasukan pengamanan dari kesatuan Angkatan

darat yang disingkat (PENAD) ke Provinsi Riau dengan sebutan istilah Team Penerangan Angkatan Darat yang dipimpin Kapten Syamsuri dari RTP.1 Jakarta. Salah satu upaya untuk membebaskan rakyat yang ketika itu di wilayah Riau daratan dan Riau Lautan Di kuasai pemerintah Republik Revolusioner. Dengan berbagai upaya dapat membebaskan rakyat dari tangan pemerintah Republik Revolusioner (PRR). Setelah kondisi daerah-daerah yang diduduki PRRI dapat direbut oleh pasukan APRI, maka team mulai melaksanakan usaha-usaha memberikan penerangantentang kebijaksanaan pemerintah Republik Indonesia. Dalam rombongan team yang di pimpin Kapten Syamsuri turut tenaga RRI pusat. Adapun rombongan Team RRI Pusat terbagi 4 tahap.

Dari ke empat Team yang bertugas (Team RRI Pusat ke Propinsi Riau, merupakan langkah-langkah awal eksistensi RRI Stasiun Pekanbaru yang turut 31 memberikan andil perjuangan khususnya dan membantu program Pemerintah Republik Indonesia. Secara berangsur-angsur RRI Pekanbaru dibenai dan ditata sedemikian rupa oleh rombongan team keempat, dan sebagai kepala Robinson Hutapea (1961- 1962) yang mendatangkan dari pusat sebuah pemancar dengan kekuatan 5Kwh dan 1 Kwh serta 1 buah jenis mobil Chevrolet sebagai sarana operasional siaran. RRI Pekanbaru secara berangsur-angsur meningkatkan operasi siarannya dengan perangkat peralatan yang cukup sederhana. RRI Pekanbaru masih mampu menyampaikan informasi menembus hutan rimba, gunung, laut, udara, dan desa- desa terpencil di Riau, bahkan diluar Provinsi Riau masih menjadi perhatian masyarakat pendengar.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil yang didapat dari berbagai sumber, maka pada bab ini penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai Peranan Radio Republik Indonesia Pekanbaru Pada Peristiwa Pemberontakan Pemerintahan Republik Revolusioner Indonesia Di Riau (1957-1958) adalah sebagai berikut Gerakan PRRI ini dimotori oleh kalangan militer, tetapi diikuti oleh semua kalangan sipil, politikus, tentara, polisi, guru, petani, dan orang-orang dari berbagai kalangan lainnya. munculnya gerakan ini berawal dari adanya reuni oleh perwira ex-divisi banteng yang dicitkan oleh pemerintah kedalam Resimen IV Sumatra Utara. Ide untuk melaksanakan sebuah reuni ini muncul ketika Ahmad Husein yang sedang berkunjung ke Jakarta bersama delegasi Gubernur Roeslan untuk menuntut perbaikan bagi kehidupan tentara di wilayah Sumatra Tengah, Agustus 1956. Pada saat itu Ahmad Husein didekati oleh perwira ex- Divisi Banteng seperti Jusuf Noer, Dahlan Djambek, dan Sjoieib. Setelah pertemuan itu, beberapa hari kemudian mereka mengadakan pertemuan kembali. Kelanjutan dari pertemuan ini adalah dibentuknya panitia reuni yang diketahui oleh Mayor Sofyan, dan akan dilaksanakan di padang pada tanggal 20-24 November 1956. Acara reuni tersebut dihadiri oleh 612 orang ex-Divisi Banteng. Dalam reuni terakhir tanggal 24 November 1956, semua yang hadir membuat dan menandatangani kesepakatan yang mereka beri nama Piagam Banteng yang nantinya akan mereka suarakan pada pemerintah pusat. Beberapa hari kemudian sebuah tim delegasi berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan tuntutan tersebut yaitu diantaranya, Ali Luis, Sitan Soeis, Hasan basri, Sidi Bakaruddin, Dahlan Djambek, Dahlan Ibrahim, dan Amdul Halim. Tujuan mereka semula adalah bermaksud untuk menemui Presiden, Wakil Presiden, anggota Kabinet, dan pimpinan lainnya. akan tetapi mereka hanya mampu bertemu Kepala Sekretaria Presiden, Mr. A. G. Pringgodigdo. Pada tanggal 15 Februari 1958 malam, Dewan Banteng memproklamkan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) melalui RRI Bukittinggi. Hal ini berarti pemberontakan terhadap NKRI telah dimulai. Tindakan Dewan Banteng yang memproklamkan berdirinya PRRI, membuat pemerintahan pusat di Jakarta segera mengambil langkah untuk menghentikan pemberontakan daerah tersebut dan memutuskan untuk segera merealisasikan UU Darurat

No. 19 Tahun 1957, dengan tujuan memecah kekuatan PRRI. Pada tanggal 1 Maret 1957 Pemerintah Pusat mengirimkan beberapa pasukan pengamanan dari kesatuan Angkatan darat yang disingkat (PENAD) ke Provinsi Riau dengan sebutan istilah Team Penerangan Angkatan Darat yang dipimpin Kapten Syamsuri dari RTP.1 Jakarta. Salah satu upaya untuk membebaskan rakyat yang ketika itu di wilayah Riau daratan dan Riau Lautan Di kuasai pemerintah Republik Revolusioner. Dengan berbagai upaya dapat membebaskan rakyat dari tangan pemerintah Republik Revolusioner (PRR). Setelah kondisi daerah-daerah yang diduduki PRRI dapat direbut oleh pasukan APRI, maka team mulai melaksanakan usaha-usaha memberikan penerangantentang kebijaksanaan pemerintah Republik Indonesia. Pada peristiwa PRRI, Radio Republik Indonesia memiliki peran penting dalam upaya menyebarkan berita pergolakan PRRI ke seluruh masyarakat riau.

Saran: Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis kemudian merumuskan beberapa hal yang di harapkan dapat menjadi saran ataupun masukan. Pemerintah diharapkan adil dalam memfokuskan pembangunan secara merata baik di pusat ataupun daerah. Diharapkan juga semoga penelitian mengenai PRRI khususnya PRRI di riau lebih berkembang lagi, karna masih sedikit jurnal mengenai PRRI yg terjadi di riau. Dan diharapkan juga semoga penelitian mengenai RRI lebih berkembang lagi baik sejarah maupun peran RRI pekanbaru pada suatu peristiwa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- "*Visualisasi Data Kependudukan-Kementrian Dalam Negeri*" 2023.
- Abdurrahman, D. (2007). *Metodologi Penelitian Sejarah*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Adler. (1987). *Membership Roles In Field Research, Nerberry Park*. (CA: Sage Publication.
- Asnan, G. (2003). *Kamus Sejarah Minangkabau*, (Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau: Gunatama.
- Bungin, B. (2014). *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Perdana Media.
- Chaniago, H. & Jasmin, K. (1998). *Brigadir Jenderal polisi Kaharoeddin Datuk Rangkayo Basa*. Jakarta: Sinar Harapan. Data kearsipan Radio Republik Indonesia Pekanbaru tahun 2016.
- Departemen Pendidikan Nasional, (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,
- Destra wati, dkk. "Riau Pasca Keluar Dari Sumatra Tengah 1957- 1985". NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 7 Tahun 2020. Hlm 39.
- Endraswara, S. (2006). *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Wiidyatama.
- Euis Fajara Siswoyo. 2020. *Proses Produksi Siaran Berita Daerah Di Radio Republik Indonesia Pekanbaru*. Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Hlm 38
- Fitrah, M. & Luthfiah. (2017). *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, Jawa Barat: CV Jejak.
- Ismaun. (2005). *Sejarah Sebagai Ilmu*, Bandung: Historia Utama Press.
- Jonaedi, E. & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group
- Kahim, A. (2005). *Dari Pemberontakan ke Integrasi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Kahin, A. (2008). *Dari Pemberontakan Ke Integrasi: Sumatra Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kemendkbudristek. 2022. "*Dasar, Fungsi, dan Tujuan Pendidikan Nasional*" <https://sisdiknas.kemdikbud.go.id/> (diakses pada 17 Mei 2024 pukul 15.33)
- Legge, J.D. (1961). *Cultural Authority and Regional Autonomy in Indonesia: A Study in Local Administration 1950-1960* (Ithaca: Cornel University Press.
-

- Leirissa, R. Z. (1991). *PRRI/Permesta Membangun Indonesia Tanpa Komunis*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti.
- Makmum Salim, *Sedjarah Operasi-operasi Gabungan terhadap PRRI- PERMESTA* (Jakarta: Departemen Pertahanan-Keamanan Pusat Sedjarah ABRI, 1971), hlm. 1-2
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mukhtazar. (2020). *Prosedur Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Absolute Media.
- Mukmin, H. (2014). *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung*, IAIN Raden Intan Lampung.
- Nazir, M. (1998). *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Novia Safitri.2022. *Manajemen Program Siaran Kelas Inspirasi RRI Pro 2 Pekanbaru Dalam Menarik Minat Pendengar*. Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Hlm 30.
- Pendapat Hasan Usman yang terdapat didalam buku karya Abdurrahman, D. (2007). *Metodologi Penelitian Sejarah*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional <https://jdih.kemenkeu.go.id/> (diakses pada 17 Mei 2024 pukul 15.44)
- Republik Indonesia,Undang -Undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran
- Salim, M. (1971). *Sedjarah Operasi-Operasi gabungan Terhadap PRRI- PERMESTA*. Jakarta: Departemen Pertahanan-Keamanan Pusat Sedjarah ABRI.
- Salim, M. *Sedjarah Operasi-Operasi gabungan Terhadap PRRI-PERMESTA*.
- Sanjaya, W. (2012). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Jakarta: Kencana.
- Sartono, K. E. (2009). *Kajian Konstitusi Indonesia Dari Awal Kemerdekaan Sampai Era Reformasi*. Humanika, 9(1), 93–106. <https://doi.org/10.21831/hum.v9i1.3786> diakses pada tanggal 2 juni 2024 pukul 03.27 wib
- Schoepfle, & Werner. (1987) *Etnographic Analysis dan Data Management*.
- Sjamsuddin. (1996). *Metodologi Sejarah*, Jakarta: PPTA Ditjen Dikti Depdikbud RI.
- Sjamsudin, H. (2007). *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta:Ombak. Soekanto, S. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Press.
- Soewardi, I. (2008). *Perjalanan Dalam Kelam; Sinarai Kisah Pemberontakan PRRI*, Yogyakarta.
- Sugiyono. (2003). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Syamdani. (2009). *PRRI, pemberontakan atau bukan*, Media Pressindo.  
[www.dukcapil.kemendagri.go.id](http://www.dukcapil.kemendagri.go.id) (diakses pada tanggal 16 Mei 2024 pukul 13.
- Yaumi, M. & Damopolii, M. (2014). *Avtion Research Teori, Model, dan Aplikasi*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group.